

Analisis terhadap perkembangan transportasi inovatif berbasis aplikasi dalam perspektif hukum persaingan usaha = Analysis of the innovative transportation development with applications in business competition law

Ahmad Nur Shadiq, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20479993&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

<p>Salah satu perkembangan transportasi saat ini adalah layanan jasa transportasi dengan menggunakan sarana aplikasi atau media online. Namun, keberadaan transportasi berbasis aplikasi tersebut menimbulkan pro dan kontra mengenai legalitasnya, serta tidak jarang menimbulkan perselisihan dengan transportasi konvensional. Penelitian ini mencoba menganalisis mengenai konsep dan peraturan transportasi berbasis aplikasi dan juga menganalisis apakah pasar bersangkutan (relevant market) taksi berbasis aplikasi sama dengan taksi konvensional serta potensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh taksi berbasis aplikasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder atau bahan pustaka, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Landasan yuridis transportasi secara umum mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Akan tetapi peraturan tersebut telah dihentikan sementara dan belum ada regulasi yang pasti mengenai transportasi berbasis aplikasi. Ditinjau dari hukum persaingan usaha, keberadaan taksi berbasis aplikasi tidak memiliki pasar bersangkutan yang sama dengan taksi konvensional. Namun, dampak keberadaan taksi berbasis aplikasi sangat dirasakan dan mempengaruhi keberadaan taksi konvensional. Selain itu, taksi berbasis aplikasi saat ini telah memiliki posisi yang dominan di bidang angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Kondisi tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yakni Pasal 6 terkait diskriminasi harga, Pasal 19 terkait diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu, Pasal 20 terkait predatory pricing, Pasal 25 dan Pasal 28 ayat (2) terkait pengambilalihan.

<hr>

<i>ABSTRACT</i>

</p><hr /><p>One of the current transportation developments is the transportation services by using the means of application or online media. However, the existence of such application-based transportation raises the pros and cons of its legality, and often leads to disputes with conventional transportation. This study attempts to analyze concepts and regulations of application-based transportation and also to analyze whether the relevant market application-based taxi are the same as conventional taxi and potential violations of Law No. 5 of 1999 by application-based taxi. Approach method used in this research is normative juridical with technique of collecting of secondary data or library material, which then analyzed by using qualitative method. The general juridical basis of transportation refers to Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transport. Ministry of Transportation has issued Regulation of the Minister of Transportation No. 108 of 2017 on the Implementation of Public Transportation of People Without the Road Trajectory. However, the

regulation has been suspended and there is no definite regulation on application-based transportation. Judging from the law of business competition, the existence of application-based taxi does not have the same relevant market with conventional taxi. However, the impact of the existence of applications-based taxi is perceived and affects the existence of conventional taxi. In addition, application-based taxi currently has a dominant position in the area of public transportation of people without the road trajectory. This condition has the potential to violate Law No. 5 of 1999 is Article 6 related price discrimination, Article 19 related to discrimination against certain business actors, Article 20 related to predatory pricing, Article 25 and Article 28 paragraph (2) related to acquisition.</p>